

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 36-52	Naskah Dikirim 15/07/2024	Naskah Direview 22/08/2024	Naskah Diterbitkan 30/09/2024
---	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM *SMART CITY* DI KOTA BEKASI

Susidi Dian Rahayu¹, Nurul Aini², Eka Putri Susianti³, Annisa Turobi'ah⁴, Arifudin⁵

¹ Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia, susidianrahayu@gmail.com

² Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia, nrlainiii21@gmail.com

^{3,4} Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia,

³ Dosen Universitas Islam Assyafiiyah, Indonesia, arifudin.sh@gmail.com.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar pada dunia pemerintahan indonesia. Melalui Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seluruh instansi baik pusat maupun daerah ditantang untuk menciptakan produk-produk inovasi baru khususnya dalam pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan mengingat penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintah cukup buruk. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan tujuan agar instansi-instansi di Kota Bekasi dapat bersaing dengan instansi daerah lain sekaligus sebagai wujud untuk mendukung program *smart city*. Penelitian ini membahas terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan kebijakan perda tersebut telah dilakukan oleh tiga instansi pemerintah yang telah menciptakan produk inovasi baru yaitu Dispendukcapil Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Kata kunci: *Smart City, Inovasi, SPBE*

ABSTRACT

Technological advances have had a considerable influence on the world of Indonesian government. Through Presidential Decree No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (EBGS), all agencies, both central and regional, are challenged to create new innovative products, especially in public services. This is because considering the community's evaluation of public services and government performance is quite poor. In response to this, the Bekasi City government issued Regional Regulation No. 03 of 2020 concerning the Implementation of an Electronic-Based Government System within

the Bekasi City Government with the aim that agencies in Bekasi City can compete with other regional agencies as well as a form of supporting the smart city program. This study discusses the implementation of an Electronic-Based Government System in the Bekasi City Government Environment. The method used in this research is descriptive qualitative method, and data collection is done through library research. Based on the results of the research conducted, the implementation of these regional regulations has been carried out by three government agencies that have created new innovative products, namely the Bekasi City Population and Civil Registry Service, the Bekasi City Social Service and the Bekasi City Health Office.

Keywords: Smart City, Inovation, EBGS

PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu cepat dan pesat di seluruh belahan dunia dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan era modern saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi begitu signifikan dengan manfaat yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi apabila dibandingkan dengan cara yang bersifat tradisional. Hal tersebut dapat membuat penyebaran informasi menjadi lebih efisien. Salah satunya ialah pada dunia pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah sehingga segala bentuk kegiatan pemerintahan saat ini dilakukan melalui sistem *online* bahkan sudah banyak instansi atau lembaga pemerintahan yang menciptakan aplikasi-aplikasi khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan di lembaga tersebut.

Indonesia memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mewujudkan visi misi tertentu dengan menyusun berbagai inovasi guna mencapai tujuan dan dipertegas dengan berbagai kebijakan baru terkait implementasi inovasi tersebut. Salah satu Inovasi yang disusun yaitu membuat sebuah kebijakan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut berdasarkan pada tuntutan atas pemerintahan yang harus semakin transparan dan akuntabel mendorong pemerintah mulai memanfaatkan teknologi internet sebagai salah satu media yang saat ini berkembang sangat pesat.

Dengan adanya kemajuan zaman, konsep pemerintahan yang tadinya *rule government* berubah menjadi *good governance*.¹ Hal tersebut juga di dorong oleh beberapa faktor pemicu karena penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang terkenal dengan banyaknya pungli, pelayanan yang lamban dan berbelit-belit, serta aparatur pemerintah yang mempersulit masyarakat dalam pengurusan berkas. Permasalahan-permasalahan itulah yang menjadi tugas besar pemerintah untuk membenahi segala urusan pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik.

¹ DISKOMINFOSTANDI. 2020. "Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Tahun 2018-2023."

Menurut Sadjijono (2007) *good governance* adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan umum dan mencakup norma yang berlaku sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Penerapan *e-government* di instansi pemerintah ditujukan untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk merubah pola pikir serta cara pandang masyarakat dalam berorientasi pada kegiatan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi.² *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan pelayanan publik secara elektronik, yang berkaitan dengan terciptanya administrasi yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.³

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada peraturan tersebut di pasal 2 (1), pelaksanaan SPBE dilakukan dengan tujuh prinsip, yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga turut serta memberikan gebrakan baru bagi pemerintah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk menciptakan manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2018 sejalan dengan terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejauh ini kementerian lembaga dan pemerintah daerah telah menyelenggarakan SPBE secara mandiri dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing serta mencapai tingkat kemajuan SPBE yang bervariasi antar daerah. Kebijakan terkait SPBE sangatlah diperlukan untuk memastikan tata kelola dan manajemen sistem secara nasional dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan. Salah satu hal terpenting dalam implementasi SPBE ini adalah adanya tata kelola SPBE yang menjamin penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Unsur-unsur tersebut meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.⁴

² Saputra, Rahmat, and Apriyanti Widiyansyah. 2021. "Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi)." *CAKRAWALA (Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika)* 21(1):39–50. doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>.

³ Rahman, Fathur, and Janwan S. R. Tarigan. 2020. *Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*. Pertama. Malang: Intrans Publishing.

⁴ DISKOMINFOSTANDI. 2021. "Dokumen Masterplan Digital Government."

Kebijakan SPBE menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan *smart city*. *Smart City* atau kota pintar merupakan sebuah konsep kemajuan zaman yang saat ini diterapkan diseluruh negara terlebih pada penyelenggaraan pemerintahan. Jonathan (2006) menjelaskan bahwa *smart city* adalah pembangunan kota yang berbasis TIK dimana terdapat ketersediaan informasi dan infrastruktur yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, masyarakat dan potensial daerah tersebut.⁵

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari program “100 *Smart City*” di Indonesia. Program tersebut akan dilaksanakan dan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Bappenas dan Staf Kepresidenan.⁶ Untuk mendukung program pemerintah dalam menerapkan kebijakan SPBE, pemerintah Kota Bekasi juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Visi SPBE Kota Bekasi merupakan cita-cita jangka panjang dari pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai pengelolaan dan pelayanan pemerintahan secara efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabilitas, interoperabel dan aman melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi SPBE Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan adil
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Program *Smart City* di Kota Bekasi telah dirintis sejak tahun 2016 dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2013-2018. Pada tahun 2018, dalam acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) ke-3, Kota Bekasi dinobatkan sebagai kota yang paling siap untuk mengimplementasikan inisiatif kota inovatif. Kota ini memiliki tingkat peningkatan tertinggi dari 100 kota pintar di Indonesia dan telah meningkat peringkatnya dari peringkat 23 menjadi peringkat 1. Kota Bekasi menerapkan enam pilar dimensi *Smart City*, yaitu pemerintahan yang kompeten, branding inovatif, ekonomi cerdas, kehidupan cerdas, lingkungan yang cerah dan masyarakat yang cerdas. Berdasarkan uraian masalah tersebut, penelitian ini akan membahas tentang implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2020 tentang SPBE di lingkungan pemerintah Kota Bekasi.

⁵ Kemen PUPR. 2015. Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia. Jakarta: Kemen PUPR.

⁶ Devega, Evita. 2017. “Langkah Menuju ‘100 Smart City.’” Kemenkominfo.

METODE PENELITIAN

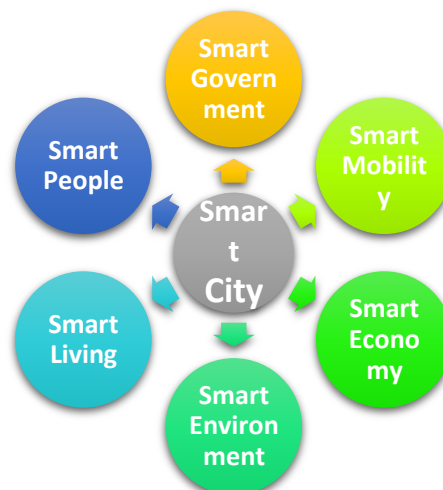
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Bekasi, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan inovasi-inovasi yang dibahas, diciptakan oleh masing-masing tiga lembaga tersebut yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat Kota Bekasi. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 1 (satu) bulan dengan melakukan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan dan mencari fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data yang relevan terkait topik dan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan melakukan pengamatan mendalam di situs resmi Disdukcapil Kota Bekasi, Dinsos Kota Bekasi, Dinkes Kota Bekasi, buku, jurnal dan sumber relevan lainnya yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Smart City dan Inovasi Pemerintahan

Dardak (2014) menjelaskan *Smart City* adalah penggunaan teknologi untuk memungkinkan kota menggunakan sumber daya secara lebih cerdas dan efisien, meningkatkan layanan dan kualitas hidup, sehingga mengurangi jejak ekologis untuk mendukung inovasi dan penggunaan ekonomi karbon rendah.⁷

Aspek utama dalam membangun *smart city* atau kota pintar (Sullivan, 2014) adalah manajemen cerdas, teknologi cerdas, infrastruktur cerdas, layanan kesehatan yang cerdas, mobilitas cerdas, bangunan cerdas, energi cerdas dan masyarakat cerdas. Kemudian, tujuan *smart city* adalah untuk menciptakan kota yang nyaman dan damai sehingga dapat menjadi alasan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.⁸



Gambar 1. Indikator Smart City

Sumber: Negara 2021

⁷ Kemen PUPR. 2015. Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia. Jakarta: Kemen PUPR.

⁸ Negara, Edi Surya. 2021. Smart Government. Palembang: (PPP-UBD Press).

Rudolf Giffinger menjelaskan ada enam indikator dalam mendukung *smart city*, yaitu *smart governance*, *smart mobility*, *smart economy*, *smart environment*, *smart living* dan *smart people*.⁹

1. **Smart governance** adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif untuk meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi penggunaan teknologi informasi yang saling terintegrasi. *Smart governance* diterapkan dalam ketiga unsur tata kelola pemerintahan, seperti pelayanan, birokrasi, dan kebijakan.
2. **Smart mobility**, pengelolaan infrastruktur pada kawasan perkotaan pastinya akan memandang keberlanjutannya ke masa depan sekaligus sebagai sistem pengelolaan terpadu yang berpedoman pada aspek kepentingan publik. Diharapkan nantinya, kota tersebut mampu menerapkan dan menyediakan infrastruktur, sistem dan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, inovatif serta mampu mendukung mobilitas masyarakat.
3. **Smart economy** ditujukan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mampu bersaing ditengah era reformasi yang disruptif sehingga perlu beradaptasi dengan cepat. Sasaran dimensi ini adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung ekonomi masyarakat sejalan dengan sektor ekonomi daerah yang luwes terhadap perubahan, serta meningkatkan finansial masyarakat melalui program-program tertentu. Sasaran tersebut dikembangkan melalui 3 elemen, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.
4. **Smart environment** adalah pengelolaan lingkungan yang pintar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembangunan perkotaan dan pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Terdapat 3 unsur dalam *smart environment*, yaitu program perlindungan terhadap lingkungan (*protection*), pengembangan tata kelola sampah dan limbah (*waste*), dan pengembangan tata kelola energi yang bertanggungjawab (*energy*).¹⁰ Tujuannya dari dimensi ini adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
5. **Smart living** ditujukan untuk menjamin taraf hidup masyarakat di suatu wilayah. Penilaian taraf hidup tersebut dilihat dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas.
6. **Smart people** adalah tujuan utama dalam mewujudkan konsep *smart city*. Kreativitas dalam pembangunan tentunya memerlukan modal, baik modal ekonomi maupun modal sosial. Modal sosial yang dimaksud ialah kepercayaan, toleransi, dan saling berkolaborasi sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Bantul Smart City. 2020. "DIMENSI SMART ENVIRONMENT." Smartcity.Bantulkab. Retrieved (<https://smartcity.bantulkab.go.id/dimensi/index/985/smart-environment.html>).

Inovasi dalam kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan publik dan akan bermanfaat bila dalam penerapannya didasarkan pada kriteria dan nilai-nilai normatif kebijakan.¹¹ Inovasi memiliki ciri yang mendasar, yaitu kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri inovasi yang menggantikan pengetahuan lama, metode, objek, teknologi atau penemuan yang tidak lagi efektif dalam memecahkan suatu masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu.¹² Menurut Rogers,¹³ ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan inovasi dalam pemerintahan, antara lain:

1. Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus memiliki kebaruan dibanding inovasi-inovasi sebelumnya. Hal tersebut ditujukan agar inovasi yang baru memiliki ciri khas dari sebelumnya.

2. Kesesuaian

Inovasi yang baru saja diciptakan sebaiknya memiliki kesesuaian dengan yang sebelumnya atau tidak memiliki perubahan yang terlalu signifikan agar pengguna dapat memahami penggunaannya dengan mudah. Selain itu juga agar inovasi terbaru tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar.

3. Kerumitan

Sebuah inovasi biasanya memiliki cukup perbedaan dibanding inovasi sebelumnya. Namun hal tersebut sangatlah wajar karena inovasi terbaru akan memberikan fitur-fitur terbaru yang lebih baik lagi sehingga terdapat sedikit kerumitan dan tidak menjadi suatu masalah yang besar.

4. Kemungkinan Dicoba

Suatu inovasi hanya dapat diterima jika telah teruji dan terbukti memiliki kelebihan atau nilai dari penemuan sebelumnya. Oleh karena itu, produk inovasi tersebut harus melalui fase "*public testing*" di mana setiap orang atau pihak manapun memiliki kesempatan untuk menguji kualitas inovasi tersebut.

5. Kemudahan Diamati

Inovasi juga harus tercermin dari bagaimana inovasi tersebut bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

B. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pemerintahan Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah salah satu pemerintah daerah yang menerapkan SPBE dan telah melakukan evaluasi mandiri, berdasarkan kategori predikat nilai Indeks SPBE Kota Bekasi tahun 2020 yaitu sebesar 3,70. Nilai ini masuk pada kategori sangat baik dan membawa pengaruh yang baik pula dalam pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Beberapa domain dan aspek pada tahun 2020 masih kurang, sudah dapat ditingkatkan

¹¹ Sururi, Ahmad. 2016. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)." Jurnal Sawala 4(3).

¹² Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi Di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.

¹³ Hutagalung, Simon Sumanjoyo, and Dedy Hermawan. 2018. Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Pertama. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

meliputi Domain Kebijakan Tata Kelola. Pada Tahun 2020 masih terdapat satu aspek yang masih kurang, yaitu pada Domain Tata Kelola SPBE.

Tabel 1. Nilai Indeks SPBE Kota Bekasi 2019-2020

Tahun		2019	2020
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	3.35	3.47
Aspek 1	Kebijakan internal tata kelola SPBE	1.35	1.35
Aspek 2	Kebijakan internal layanan SPBE	2.00	2.12
Domain 2	Tata Kelola SPBE	2.57	3.00
Aspek 3	Kelembagaan	0.43	0.71
Aspek 4	Strategi perencanaan	1.00	1.00
Aspek 5	Teknologi informasi dan komunikasi	1.14	1.29
Domain 3	Layanan SPBE	3.88	4.12
Aspek 6	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	2.36	2.55
Aspek 7	Layanan publik berbasis elektronik	1.52	1.58
Nilai Indeks SPBE Kota Bekasi		3.32	3.70

Sumber: Dokumen Masterplan Digital Government Kota Bekasi

Berdasarkan tabel nilai indeks SPBE Kota Bekasi diatas, di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan sehingga angka indeks tersebut naik. Nilai indeks SPBE tahun 2020 mencapai 3.70 dan masuk dalam kategori predikat SPBE sangat baik. Beberapa domain dan aspek di tahun 2020 yang masih kurang sudah dapat ditingkatkan meliputi domain kebijakan tata kelola.

Salah satu hambatan dalam penerapan SPBE di pemerintah Kota Bekasi adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi antar instansi. Menindaklanjuti hal tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres tersebut menjadi sebuah gebrakan baru dari era *e-government* menjadi *i-government (integrated government)*.

i-government adalah penerapan *smart government* yaitu sistem yang saling terintegrasi satu dengan lainnya sehingga antar sistem dapat berinteraksi dan menghasilkan data yang saling mendukung. Data yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di daerah. Perpres No.95 Tahun 2018 menyatakan bahwa sistem integrasi bertujuan untuk membentuk satu kesatuan antar pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Hambatan lain yang muncul ialah pada aspek sumber daya manusia karena kompetensi yang kurang memadai sehingga kurangnya kesiapan individu untuk menggunakan layanan *e-government*, kurangnya pendidikan dan kurangnya literasi digital.

B. Instansi Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, pemerintah Kota Bekasi khususnya dinas-dinas terkait telah menciptakan berbagai inovasi terbaru yang berbentuk aplikasi maupun website untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan pemerintah yang diinginkannya. Instansi-instansi tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Bekasi, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Inovasi yang dibuat oleh instansi ini ialah aplikasi e-OPEN, yaitu aplikasi yang dikhususkan untuk mengurus segala layanan kependudukan mulai dari akta kelahiran, akta kematian, pembuatan e-KTP, hingga perpindahan kependudukan. Dengan adanya aplikasi ini, banyak masyarakat yang merasa terbantu ditambah dengan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya.

Halo Pamor adalah salah satu fitur yang ada di aplikasi e-OPEN yang memiliki manfaat dan ketertarikan cukup tinggi di masyarakat. Halo Pamor adalah penyediaan satgas pamor di lingkungan RW setempat yang dapat membantu masyarakat dalam mengurus data kependudukan khususnya mereka yang memiliki keterbatasan waktu, fisik maupun teknologi. Satgas pamor memiliki tugas dan fungsi sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dengan kelurahan dan tugasnya ialah untuk mensosialisasikan setiap program kepada pengurus RT dan RW setempat serta mengajak peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam program tersebut.

Tak hanya Halo Pamor, fitur lain yang juga tak kalah menarik adalah Jebol Dukcapil dan Duduk Mesra. Fitur menu Jebol Dukcapil (Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) adalah layanan administrasi yang dilakukan oleh pihak Dispendukcapil Kota Bekasi dengan melakukan kunjungan ke tiap kelurahan maupun RW setempat. Menu Jebol Dukcapil diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti disabilitas, orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ), masyarakat terdampak bencana, masyarakat adat, dan sebagainya. Bagi masyarakat yang tergolong dalam ODGJ, disabilitas dan masyarakat terlanjar yang ditampung oleh yayasan sosial akan dilakukan pendataan dan akan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bekasi.

Lain halnya dengan fitur menu Duduk Mesra. Menu ini ditujukan untuk menerima masukan dan kritikan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang dilakukan pihak Dispendukcapil Kota Bekasi. Dalam fitur Duduk Mesra, tersedia tiga jenis layanan yaitu 2 (dua) layanan pengaduan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta 1 (satu) layanan konsultasi layanan kependudukan yang nantinya layanan tersebut akan terhubung pada tiga kanal whatsapp milik Dispendukcapil Kota Bekasi. Waktu pelayanan akan diberikan selama 5 (lima) hari kerja dan dalam jam kerja yang telah ditentukan.

2. Dinas Sosial Kota Bekasi

a. E-Sosial Kota Bekasi

E-Sosial adalah inovasi berupa platform aplikasi berbasis *website* dan terintegrasi dengan berbagai pelayanan yang di sediakan Dinas Sosial Kota Bekasi. *Website* ini menyediakan empat layanan sosial, antara lain:

- Sistem Informasi Pengaduan Sosial (SIPANSOS)
- Surat Keterangan Terdaftar (SKETER)
- Cek Bantuan Sosial (BANSOS)
- *Survey* Kepuasan Masyarakat (SKM)

Portal e-Sosial dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan sosial yang tersedia pada satu website saja. Dengan adanya layanan yang terpusat dalam satu portal, masyarakat tidak perlu lagi mencari situs-situs layanan sosial lainnya karena sudah tersedia di portal tersebut. Tak hanya itu, adanya inovasi portal e-Sosial ditujukan agar layanan sosial menjadi pelayanan satu pintu yang akan terintegrasi dengan layanan-layanan sosial lainnya.

b. Sistem Informasi Pengaduan Sosial (SIPANSOS)

SIPANSOS adalah aplikasi pelayanan *online* berbasis website yang dapat diakses melalui tautan <https://e-sosial.bekasikota.go.id/>. Dengan adanya *website* tersebut, diharapkan masyarakat dapat membantu Dinas Sosial dalam menanggapi laporan-laporan terkait gelandangan, bantuan sosial dan bantuan kebencanaan lainnya.

Di dalam *websitenya*, tersedia berbagai layanan, seperti cek data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan kesehatan masyarakat (LKM), orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar baik lansia maupun anak, persyaratan adopsi anak, surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan pendaftaran layanan kesejahteraan sosial (LKS). Dalam kategorinya juga tersedia berbagai bantuan, mulai dari bantuan disabilitas, bantuan sosial kelembagaan, bantuan sosial covid-19 dan bantuan sosial kebencanaan.

Semua kategori layanan yang telah disebutkan diatas, ditanggapi secara langsung oleh petugas *backoffice* yang sedia 24 jam. Laporan yang masuk akan langsung ditindak lanjuti dengan menjawab, tindak lanjut, pendampingan dan proses-proses lainnya. Seluruh proses informasi yang diajukan masyarakat di *website* tersebut dapat dipantau secara umum. Selain itu, masyarakat juga dapat memilih pengajuan pengaduan baik melalui metode umum maupun rahasia untuk menjaga privasi laporan yang diajukannya (Dinas Sosial Kota Bekasi 2022b). Selain memudahkan masyarakat, aplikasi SIPANSOS juga membantu petugas pelayanan dalam mengupdate tanggapan terkait laporan masyarakat tersebut. Hal tersebut juga memacu adanya kepuasan di masyarakat terkait kinerja aparatur pemerintah.

SIPANSOS atau sistem pengaduan sosial memiliki fitur grupchat, yaitu pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), karang taruna, taruna siaga benacana (TAGANA) dan pusat kesejahteraan sosial (PUSKESOS) yang berkontribusi untuk memantau perkembangan laporan dari masyarakat sebagai bahan penindaklanjutan dan penyelesaian yang memerlukan pendampingan dan penjangkauan. Tak hanya itu, di dalam website SIPANSOS juga tersedia fitur pooling dan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga melalui fitur tersebut pihak Dinas Sosial dapat mengevaluasi kinerja aparaturnya maupun evaluasi sistem layanannya.

c. Surat Keterangan Terdaftar (SKETER) Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial

Sebelumnya di tahun 2019, Dinas Sosial Kota Bekasi menciptakan sebuah inovasi bernama “Organisasi Sosial *On The Web* atau Orsos OTW”. Inovasi tersebut berbasiskan *website* yang bertujuan untuk mengendalikan layanan penerbitan surat keterangan terdaftar pada organisasi sosial atau Orsos. Aplikasi Orsos OTW memiliki kelemahan dalam hal penerbitan surat karena belum tersedianya tanda tangan secara digital.

SKETER atau surat keterangan terdaftar bagi lembaga/yayasan kesejahteraan sosial Kota Bekasi adalah inovasi baru pengganti Orsos OTW yang memiliki fitur terbaru dibanding aplikasi sebelumnya. Aplikasi ini merupakan pembaharuan aplikasi sebelumnya yang juga ditujukan untuk seluruh lembaga atau yayasan sosial di Kota Bekasi agar dapat mendaftarkan lembaga/yayasannya ke Dinas Sosial Kota Bekasi. Dengan adanya pendataan lembaga/yayasan sosial maka Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki data yang valid dan dapat mengidentifikasi jumlah dan keberadaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di Kota Bekasi agar nantinya dapat dikategorikan berdasarkan pelayanan pemerlu penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) sesuai pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut juga ditujukan agar lembaga atau yayasan penyedia kesejahteraan sosial mendapatkan bantuan sosial atau hibah bantuan sosial untuk kelangsungan hidup pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang termasuk dalam binaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dalam aplikasi SKETER, tersedia fitur *QR Code* yang berisikan tanda tangan digital yang telah terintegrasi dengan sistem layanan sosial lainnya. Dengan adanya *QR code* tersebut, lembaga terkait dapat mencetak sendiri surat tersebut tanpa perlu datang ke Dinas Sosial Kota Bekasi. Pada pengaplikasiannya, di tahun 2020 telah terdaftar 115 lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di Dinas Sosial Kota Bekasi. Namun jumlah lembaga tersebut bertambah menjadi 355 lembaga kesejahteraan sosial pada tahun 2021 setelah

menggunakan aplikasi SKETER karena dirasa cukup mudah menggunakan aplikasi tersebut. Tak hanya fitur *QR Code*, fitur baru lainnya yang tersedia dalam aplikasi SKETER adalah rekomendasi surat keterangan terdaftar (SKT) Provinsi Jawa Barat baik baru maupun perpanjangan, dan perubahan data yang mencakup nama ketua, alamat, jenis layanan dan sebagainya.

d. Sistem Verifikasi dan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial (SI KITA)

Inovasi SI KITA merupakan terobosan baru yang diciptakan Dinas Sosial Kota Bekasi untuk mendukung proses verifikasi dan pendataan lembaga kesejahteraan sosial masyarakat penerima dana hibah dan bantuan sosial. Sistem ini dapat digunakan untuk melaksanakan verifikasi dengan penyandingan data proposal lembaga kesejahteraan sosial yang mengajukan permohonan, menginput dan mengolah, menyajikan data, menginput evaluasi dan laporan sekaligus sebagai *database*.

Tujuan diciptakannya inovasi SI KITA adalah agar dana hibah maupun bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat terdistribusikan dengan baik sesuai skala prioritas target yang dituju, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, pengoptimalan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kesejahteraan sosial sekaligus membantu aparat pemerintah dalam mendata masyarakat.

3. Dinas Kesehatan Kota Bekasi

a. Sistem Informasi Rujukan Online (SIRINE PSC 119)

Aplikasi ini ditujukan untuk mendukung program layanan kesehatan pada keselamatan hidup masyarakat untuk mempercepat orang tersebut mendapatkan pertolongan medis dan layanan ambulans yang berbasis web dan android. Aplikasi SIRINE PSC 119 mencakup proses pengelolaan laporan masyarakat, data pasien rujukan dan pelayanan medis non rujukan, monitoring lokasi ambulans yang terdekat dengan lokasi masyarakat yang membutuhkan, serta membantu proses rekapitulasi laporan yang secara otomatis dan sistematis mulai dari laporan harian hingga tahunan. Aplikasi SIRINE PSC 119 telah digunakan oleh 52 ambulans transport yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi, 5 ambulans khusus gawat darurat dengan kasus tertentu dan 4 ambulans jenazah.

Strategi yang dilakukan dalam menerapkan penggunaan aplikasi ini yaitu melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna, penyediaan buku petunjuk penggunaan aplikasi, mengadakan ruang diskusi melalui media sosial dan penyediaan jaringan internet *dedicated* agar pengguna dapat mengakses aplikasi dengan mudah dan cepat.

b. Sistem Informasi Jaminan Online (SI JONI) Berbasis Pada NIK Kota Bekasi

Sistem Informasi Jaminan Online atau SI JONI adalah salah satu terobosan baru Dinas Kesehatan Kota Bekasi berupa aplikasi yang dapat mendukung program layanan kesehatan masyarakat yang berbasis pada NIK Kota Bekasi. Aplikasi ini mencakup mulai dari proses pengelolaan kepesertaan pembuatan surat rujukan puskesmas, surat rekomendasi Dinas Sosial, surat keterangan layanan kesehatan (SKLK) sebagai surat jaminan pembiayaan, proses klaim secara digital, verifikasi dan pencatatan pembayaran. Aplikasi ini ditujukan untuk mendukung pencapaian nilai-nilai dalam SDG's sekaligus mengurangi resiko kematian ibu hingga kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup.

Dalam proses pengelolaan peserta pada aplikasi SI JONI, pihak dinas kesehatan menggunakan data kependudukan Kota Bekasi dan data kepesertaan penerima layanan kesehatan masyarakat (LKM), badan penyelenggara jaminan sosial penerima bantuan iuran (BPJS PBI APBD) dan APBN yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai acuan untuk membuat surat rujukan, surat rekomendasi Dinas Sosial dan surat jaminan tepat sasaran yang bukan peserta BPJS atau BPJS Non Aktif. Aplikasi ini telah digunakan oleh 43 Puskesmas di Kota Bekasi, 51 Rumah Sakit dalam dan luar Kota Bekasi dan Dinas Sosial. Pada pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi bekerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinsos Kota Bekasi, Puskesmas Kota Bekasi, Rumah Sakit luar dan dalam Kota Bekasi, serta verifikator independen.¹⁴

C. Analisis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Bekasi, perlu dilakukan penilaian terhadap inovasi-inovasi pemerintahan yang telah dibuat. Menurut Rogers¹⁵ ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan inovasi dalam pemerintahan, antara lain:

1. Keuntungan Relatif

Inovasi yang diciptakan oleh Dispendukcapil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi memiliki kebaruan dibanding sebelumnya. Inovasi yang diciptakan merupakan salah satu langkah untuk mengubah sistem pelayanan publik menjadi digital. Hal tersebut memberikan perubahan yang sangat signifikan. Misalnya, jika dahulu seluruh aspek pelayanan publik dilakukan hanya dengan datang langsung ke dinas atau instansi terkait, dengan adanya inovasi berupa aplikasi maupun website masyarakat dapat

¹⁴ Dinas Sosial Kota Bekasi. 2022b. "SIPANSOS (SISTEM PENGADUAN SOSIAL)."

¹⁵ Hutagalung, Simon Sumanjoyo, and Dedy Hermawan. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Pertama*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

mengaksesnya dimana saja dan kapan saja tanpa perlu datang dan mengantri.

Dispendukcapil Kota Bekasi dengan inovasi nya berupa aplikasi e-OPEN sangatlah memudahkan masyarakat untuk mengurus segala kebutuhan terkait kependudukan. Apalagi jika memanfaatkan fitur layanan lainnya yang tersedia di dalamnya seperti menu Halo Pamor. Dengan adanya aplikasi tersebut, banyak masyarakat yang merasa terbantu sehingga urusan kependudukan yang tadinya terkenal rumit, saat ini dipandang sebagai layanan yang cepat dan mudah.

Dinas Sosial Kota Bekasi dengan inovasi berupa portal e-Sosial yang berisikan beberapa layanan sosial lainnya yang terpadu pada satu pintu, memudahkan masyarakat untuk mengurus dan melaporkan segala jenis laporan sosial yang terjadi di sekitarnya. Misalnya jika masyarakat menemukan ODGJ atau orang terlantar, maka mereka dapat langsung mempotret orang tersebut dan menguploadnya di situs e-Sosial tersebut. Tak hanya itu, proses yang sedang berjalan pun dapat dipantau dalam situs tersebut.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan inovasi berupa aplikasi SIRINE PSC 119 dan SI JONI. Kedua inovasi tersebut juga sangat membantu masyarakat khususnya dalam aspek kesehatan. Misalnya dengan aplikasi SIRINE PSC 119, masyarakat dapat dengan cepat menghubungi kontak kesehatan yang tersedia dan dekat dengan lokasinya sehingga kebutuhan gawat darurat masyarakat dapat dengan cepat ditangani.

Terkait pencetakan surat di beberapa instansi, saat ini sudah di sertakan tanda tangan berupa QR Code sehingga masyarakat dapat mencetaknya sendiri tanpa mengurangi legalitas dokumen tersebut. Tak hanya itu, beberapa inovasi dari dinas-dinas terkait tersebut memiliki sistem yang terintegrasi satu sama lain sehingga datanya terpusat. Hal tersebut sangat menguntungkan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Artinya dengan adanya data yang terpusat, masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan tidak perlu lagi untuk mendaftarkan kembali data dirinya, karena sudah terecord di data instansi lain yang terhubung. Selain itu, juga memudahkan kerja pemerintah sehingga pelayanan yang diberikan pun semakin efektif dan efisien.

2. Kesesuaian

Beragam inovasi yang telah dibuat, tidak jauh berbeda dengan inovasi sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa pembaharuannya masih sesuai dengan yang lama. Misalnya seperti aplikasi e-OPEN milik Dispendukcapil yang merupakan inovasi baru dari sebelumnya yaitu aplikasi SIMPADUK yang dinilai kurang optimal. Sama halnya dengan Dispendukcapil Kota Bekasi, Dinas Sosial juga menciptakan aplikasi baru bernama SKETER yang ditujukan untuk mengganti aplikasi lama bernama Organisasi Sosial

On The Web atau Orsos OTW. Kedua aplikasi tersebut diklaim tidak memiliki perubahan yang signifikan dibanding aplikasi sebelumnya.

3. Kerumitan

Inovasi yang dibuat dengan berbasis pada website maupun aplikasi, dinilai tidak memberikan kerumitan bagi masyarakat maupun aparaturnya pemerintah dalam penggunaannya. Biasanya dalam aplikasi atau inovasi terbaru memiliki fitur-fitur tambahan, tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah yang cukup besar dan rumit. Sehingga apabila masyarakat merasa bingung dalam penggunaannya, instansi terkait telah menyediakan cuplikan video tutorial terkait penggunaan aplikasi tersebut.

4. Kemungkinan Dicoba

Dalam penggunaannya, beberapa aplikasi sudah dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat. Aplikasi-aplikasi yang telah dibuat memang ditujukan agar digunakan oleh masyarakat. Untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan aplikasi tersebut, tentunya diperlukan berbagai cara maupun metode yang menarik dan sebagai percontohan penggunaan aplikasinya. Aplikasi yang baru saja dirilis tentunya masih memiliki beberapa kelemahan sehingga nantinya menjadi aspek yang perlu diperbaiki agar lebih baik lagi. Tentunya sebelum aplikasi maupun website ini disebarluaskan, maka diujikan terlebih dahulu kepada beberapa target tujuan untuk menilai sejauh mana keefektifitasan aplikasi dalam mendukung pelayanan publik tersebut. Dan setelahnya akan dilakukan evaluasi terkait pelaksanaannya tersebut.

Setelah diuji coba, biasanya aplikasi tersebut akan langsung disebarluaskan. Dalam penggunaannya, tentu pihak yang terkait akan terus mengontrol perkembangan aplikasi tersebut dan akan selalu dipantau agar jika terjadi kendala dapat langsung ditangani. Sehingga layanan publik secara digital akan berjalan semakin efektif, efisien dan transparan.

5. Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi haruslah memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat. Kemudahan yang dapat diamati dari sebuah inovasi adalah dari hasil yang dicapai dari pelaksanaan penggunaan inovasi itu sendiri. Inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh ketiga instansi tersebut dapat diamati dari hasil yang didapat masyarakat terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Selain dapat mengubah sistem pelayanan publik yang kolot, dengan adanya pembaruan pelayanan ke metode digital juga memberikan aspek transparansi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengontrol sejauhmana laporan atau pengurusan layanan tersebut dilakukan oleh instansi terkait. Dengan adanya inovasi ini juga, pelayanan publik menjadi semakin praktis, jauh dari KKN, dan efisien.

KESIMPULAN

Gebrakan kebijakan baru terkait sistem pemerintahan berbasis elektrobik (SPBE) melalui Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi seluruh instansi pemerintah di daerah. Saat ini masing-masing instansi tersebut berlomba menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mendukung kotanya menjadi *smart city*. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang juga mendukung hal tersebut dengan memperkuat kebijakan melalui Perda No.03 Tahun 2020 tentang Penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Penerapan kebijakan tersebut dapat dilihat dari tiga instansi yang telah membuat inovasi baru seperti Dispendukcapil Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi, dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Ketiga instansi tersebut saling menciptakan inovasi terbaru yang juga saling terintegrasi satu sama lain sehingga semakin memudahkan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi di ketiga dinas tersebut, masyarakat dapat merasa puas dengan layanan yang diberikan serta dapat mendukung kinerja pemerintah menjadi lebih baik melalui fitur-fitur survey kepuasan yang telah disediakan. Sehingga instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja instansi nya tersebut. Tak hanya itu, diharapkan pula instansi pemerintah lainnya dapat mencontoh instansi yang telah berhasil menciptakan inovasi terbaru sehingga program 100 *smart city* dapat terwujud.

REFERENSI

- Bantul Smart City. 2020. "DIMENSI SMART ENVIRONMENT." *Smartcity.Bantulkab*. Retrieved (<https://smartcity.bantulkab.go.id/dimensi/index/985/smart-environment.html>).
- Devega, Evita. 2017. "Langkah Menuju '100 Smart City.'" *Kemenkominfo*.
- Dinas Sosial Kota Bekasi. 2022a. "SI JONI (Sistem Jaminan Online) Dalam Program Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK Kota Bekasi."
- Dinas Sosial Kota Bekasi. 2022b. "SIPANSOS (SISTEM PENGADUAN SOSIAL)."
- DISKOMINFOSTANDI. 2020. "Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Tahun 2018-2023."
- DISKOMINFOSTANDI. 2021. "Dokumen Masterplan Digital Government."
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, and Dedy Hermawan. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kemen PUPR. 2015. *Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia*. Jakarta: Kemen PUPR.
- Negara, Edi Surya. 2021. *Smart Government*. Palembang: (PPP-UBD Press).
- Saputra, Rahmat, and Apriyanti Widiensyah. 2021. "Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi)." *CAKRAWALA (Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika)* 21(1):39–50. doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>.

- Sururi, Ahmad. 2016. “Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris).”
Jurnal Sawala 4(3).
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.